

PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SEBAGAI PENCETAK SUMBER DAYA MANUSIA HANDAL

Yepi Sedy Purwananti
yepisedya@gmail.com
STKIP PGRI TULUNGAGUNG

ABSTRACT

Education as a pillar of life highly contributes the quality of human beings. Education is the process of facilitating learning, or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs and habits. Our constituent UUD 1945 states that education must be held to improve the quality of our nation. More detail, UU Sisdiknas No 20 year 2003 explains the components, aims principles, and functions of education for our nation. In order to improve the quality of human sources, the quality of education must be considered advance. The aim of Indonesia national education is to improve the quality of Indonesian citizen both mentally and spiritually. There are some theories that can be applied in increasing the quality of education such as Total Quality Management (TQM), School Based Management or Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). In brief, increasing the quality of education means increasing the quality of human resources to be able to compete in international competition.

Key words: *Education, Quality, Human Resources.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu dasar atau pondasi dalam memperoleh kehidupan yang baik. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia telah mengamanatkan bahwa pendidikan harus diselenggarakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Setelah melewati perjalanan hidup sebagai bangsa yang merdeka selama 70 tahun, perlu kiranya direnungkan dan direfleksikan tentang apakah sudah terwujud apa yang menjadi amanat tersebut.

Dalam UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip , yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Selain itu dalam penyelenggaraan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan

mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan

Beberapa kajian dari para peneliti dan institusi baik dalam dan luar negeri memaparkan hasil yang cukup beragam tentang bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia. Beberapa menunjukkan kondisi pendidikan Indonesia yang memprihatinkan. Ini dibuktikan dengan data tentang peringkat Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index, HDI*) yang dirilis UNDP, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kapita yang menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia Indonesia masih senantiasa di peringkat bawah dunia. Di antara seluruh negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), ke-109 (1999), Ke-111 (2007), ke-124 (2011), ke-121 (2012), dan ke-108 (2013).

Menurut survei *Political and Economic Risk Consultant* (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia

berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan *The World Economic Forum Swedia* (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survey dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai *follower* bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia.

Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan oleh data Balitbang (2003) bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Primary Years Program* (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Middle Years Program* (MYP) dan dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Diploma Program* (DP).

UNESCO pada tahun 2012 melaporkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 120 berdasarkan penilaian *Education Development Index* (EDI) atau Indeks Pembangunan Pendidikan. Total nilai EDI itu diperoleh dari rangkuman perolehan empat kategori penilaian, yaitu angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi menurut kesetaraan gender, angka bertahan

siswa hingga kelas V Sekolah Dasar. (UNESCO: 2012).

Hasil studi PISA (*Program for International Student Assessment*), yaitu studi yang memfokuskan pada literasi bacaan, matematika, dan IPA, menunjukkan peringkat Indonesia baru bisa menduduki 10 besar terbawah dari 65 negara. Hasil studi TIMSS (*Trends in International Mathematics and Science Study*) menunjukkan siswa Indonesia berada pada peringkat amat rendah dalam beberapa hal seperti memahami informasi yang kompleks, memahami teori, analisis dan pemecahan masalah, serta dalam hal investigasi ilmu.

Dari sisi tenaga pendidik, dunia pendidikan Indonesia juga menghadapi masalah yang tidak ringan. Berdasarkan jumlah pendidik yang ada di Indonesia sebagian besar ternyata tidak memiliki kualifikasi yang relevan dengan bidang yang diajarkannya. Belum lagi menyangkut masalah kompetensi keilmuan yang ternyata masih sangat rendah. Hasil studi Bank Dunia tahun 2012 menunjukkan hasil bahwa program sertifikasi guru yang ditujukan bagi peningkatan mutu pendidikan, ternyata tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Sertifikasi guru lebih berdampak kepada tingkat kesejahteraan guru, namun tidak berdampak pada peningkatan kompetensi guru. Program sertifikasi memberi dampak

signifikan pada peningkatan minat lulusan SMA untuk melanjutkan pendidikan ke LPTK.

Sementara itu dari sisi penyelenggaraan pendidikan, masih banyak masyarakat yang merasakan bahwa biaya pendidikan di Indonesia masih cukup tinggi. Meski pemerintah sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar bagi pendidikan melalui APBN dan APBD, namun biaya pendidikan yang harus ditanggung masyarakat tetaplah besar. Hal ini masih ditambah dengan semakin rumitnya pasar tenaga kerja bagi tenaga kerja terdidik. Angka pengangguran bagi mereka yang memiliki pendidikan formal level menengah dan tinggi semakin meningkat. Seolah pendidikan tidak dapat menjawab persoalan yang terjadi di masyarakat.

PEMBAHASAN

Definisi Pendidikan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diartikan sebagai berikut “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Sementara itu menurut Carter V. Good dalam Ahmadi (2014: 32-33), pendidikan diartikan sebagai (a) seni, praktik, atau profesi sebagai pengajar (pengajaran), dan (b) ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan metode-metode mengajar, pengawasan, dan bimbingan murid; dalam arti luas digantikan dengan istilah pendidikan. Selanjutnya, Carter menyatakan bahwa pendidikan adalah (a) proses perkembangan pribadi, (b) *social process*, (c) *professional course*, dan (d) seni untuk membuat dan memahami ilmu pengetahuan yang tersusun dan diwarisi/dikembangkan masa lampau oleh tiap generasi bangsa.

Pendidikan sebagai seni artinya pendidikan harus berlangsung sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing individu (peserta didik). Sementara individu yang satu dengan yang lain memiliki karakteristik yang berbeda. Di sinilah seorang pendidik harus mampu menghadapi setiap peserta didik dengan cara-cara tertentu sehingga seluruh peserta didik dapat belajar secara efektif. Pendidikan sebagai praktik dimaksudkan untuk mengukur kemampuan dan mengembangkan potensi peserta didik masing-masing serta mengantarkannya menjadi mandiri. Oleh karena itu, proses pendidikan

(pembelajaran) hendaknya melibatkan peserta didik secara aktif karena pada dasarnya mereka yang belajar. Sementara keberadaan guru lebih berperan sebagai pemberi kemudahan (fasilitator). Dalam hal ini, penerapan metode praktik dalam proses pendidikan menjadi sangat penting.

Pendidikan sebagai profesi artinya tugas atau pekerjaan mendidik mensyaratkan dimilikinya keahlian atau disiplin ilmu spesifik. Guru yang profesional adalah guru yang mengajar sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Pendidikan sebagai proses pengembangan pribadi. Artinya, pendidikan dimaksudkan untuk mengembangkan pribadi peserta didik menjadi orang yang dewasa secara psikologis. Seseorang dikatakan dewasa terutama ditunjukkan dengan kemampuannya untuk membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang bermanfaat dan yang merugikan, dan mereka berperilaku sesuai dengan pemahaman tersebut. Pendidikan sebagai proses sosial artinya memungkinkan peserta didik mampu berinteraksi dan saling menyesuaikan diri dengan sesama teman belajarnya sehingga bisa saling belajar secara efektif. Pendidikan sebagai pelatihan profesional bahwa para pendidik senantiasa berusaha mengembangkan profesinya melalui keterlibatan dalam berbagai aktivitas pengembangan profesi keguruan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi manusia dengan lingkungannya yang berlangsung secara sadar dan terencana dalam rangka mengembangkan segala potensinya, baik jasmani (fisik) dan rohani (pikir, rasa, karsa, cipta, dan budi nurani) yang menimbulkan perubahan positif dan kemajuan, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik yang berlangsung secara terus-menerus guna mencapai tujuan hidupnya. Dengan demikian, pendidikan bisa dipahami sebagai proses dan hasil. Sebagai proses, pendidikan merupakan serangkaian kegiatan interaksi manusia dengan lingkungannya yang dilakukan secara sengaja dan terus menerus. Sebagai hasil, pendidikan menunjuk pada hasil interaksi manusia dengan lingkungannya berupa perubahan dan peningkatan kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Tujuan Pendidikan

Setiap bangsa dan negara pasti menyelenggarakan sistem pendidikan yang bisa saja terjadi keberagaman dalam penyelenggarannya. Pendidikan yang berproses dalam latar belakang yang berbeda akan memiliki tujuan yang berbeda pula. Perbedaan tujuan pendidikan tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi sosial budaya, sistem politik, potensi sumber daya alam, dan sebagainya. Meski demikian tetap ada ruang

untuk mengidentifikasi kesamaannya.

UNESCO dalam agendanya menyatakan bahwa tujuan dilaksanakannya pendidikan adalah untuk semua tujuan (*education for all goals*). Ada enam tujuan pendidikan yang disepakati secara internasional di bawah UNESCO dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan belajar semua anak, remaja, dan orang dewasa. Keenam tujuan tersebut antara lain:

1. Memperluas dan meningkatkan perawatan dan pendidikan anak usia dini yang komprehensif, terutama bagi anak-anak yang paling rentan dan kurang beruntung.
2. Memastikan bahwa menjelang tahun 2015, semua anak khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk etnik minoritas, memiliki akses ke pendidikan dasar lengkap, gratis, dan wajib dengan kualitas yang baik.
3. Memastikan kebutuhan belajar semua anak muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil terhadap pembelajaran yang tepat dan program keterampilan hidup.
4. Mencapai 50 persen perbaikan dalam tingkat keaksaraan dewasa menjelang tahun 2015 terutama bagi perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa.

5. Menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah pada 2005 dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan pada 2015 dengan fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan sama pada prestasi dalam pendidikan dasar dengan kualitas baik.
6. Meningkatkan semua aspek kualitas pendidikan dan memastikan keunggulan semua sehingga hasil pembelajaran yang diakui dan terukur dicapai oleh semua, terutama dalam keaksaraan, berhitung, dan keterampilan hidup yang penting.

Menurut Havelock & Huberman (1977) dalam Ahmadi (2014: 43), dalam suatu sistem yang paling besar adalah sistem pendidikan, termasuk unsur-unsur pendidikan formal dan nonformal; yang bertujuan lebih jauh untuk pembangunan negara secara keseluruhan melalui penyediaan tenaga kerja yang terampil untuk peranan-peranan yang beragam dan melalui pengajaran pada generasi baru mengenai tujuan-tujuan masyarakat secara menyeluruh dan alat-alat pemenuhan mereka.

Tujuan pendidikan nasional di Indonesia adalah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri,

tanggung, cerdas, kreatif, terampil, disiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berorientasi masa depan. Iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan budaya belajar di kalangan masyarakat terus dikembangkan agar tumbuh sikap dan perilaku yang kreatif, inovatif, dan keinginan untuk maju (GBHN, 1993: 95).

Menurut Pasal 3 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung. Jadi fungsi pendidikan dalam pasal tersebut mengandung dua aspek, yakni: (a) sebagai kegiatan sosial-kolektif agar pendidikan bisa ditujukan pada perwujudan nilai-nilai sosial; dan (b) realisasi diri atau keinginan individu

guna mengembangkan potensi diri guna mencapai kehidupan yang lebih baik bagi diri dan sesamanya (Darmawan, 2011).

Dengan demikian, tujuan pendidikan secara umum adalah mengembangkan segala potensi bawaan manusia secara integral, simultan, dan berkelanjutan agar manusia mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dalam kehidupan guna mencapai kebahagiaan di masa sekarang dan masa mendatang. Tujuan pendidikan disesuaikan dengan dimensi-dimensi kehidupan manusia. Setiap dimensi kehidupan memiliki tujuan masing-masing dan semua dimensi itu motor penggeraknya adalah manusia yang memilih, menentukan, dan melaksanakan pilihannya guna mencapai tujuan hidup manusia itu sendiri.

Kualitas Pendidikan

Salah satu teori tentang kualitas yang dapat diaplikasikan dalam dunia pendidikan adalah Teori *Total Quality Management* (TQM). Teori ini menjelaskan bahwa mutu sekolah dapat dilihat dari tiga kemampuan, yaitu kemampuan akademik, kemampuan sosial, dan kemampuan moral. Menurut teori ini, mutu sekolah ditentukan oleh tiga variabel, yakni kultur sekolah, proses belajar mengajar dan realitas sekolah. Kultur sekolah merupakan nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, upacara-upacara, slogan-slogan, dan berbagai perilaku yang telah lama

terbentuk di sekolah dan diteruskan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya baik secara sadar maupun tidak. Kultur yang kondusif bagi peningkatan mutu akan mendorong perilaku warga sekolah ke arah peningkatan mutu sekolah.

Kultur sekolah dipengaruhi dua variabel, yakni variabel pengaruh eksternal dan internal sekolah itu sendiri. Pengaruh eksternal dapat berupa peraturan perundang-undangan dari pemerintah, perkembangan teknologi, media massa, lingkungan, dan sebagainya. Kondisi internal adalah keadaan dan kondisi faktual yang ada di sekolah yang meliputi peraturan yang ditetapkan sekolah, sarana prasarana, interaksi antar warga sekolah, dan sebagainya. Sekolah yang memiliki peraturan yang diterima dan dilaksanakan oleh warga sekolah akan memiliki dampak terhadap mutu sekolah yang bersangkutan.

Kualitas kurikulum dan proses belajar mengajar merupakan variabel ketiga yang mempengaruhi mutu sekolah. Variabel ini merupakan variabel yang paling dekat dan paling menentukan mutu lulusan. Kualitas kurikulum dan PBM memiliki hubungan timbal balik dengan realitas sekolah. Di samping itu juga dipengaruhi oleh faktor internal sekolah. Faktor internal adalah aspek kelembagaan dari sekolah seperti struktur organisasi, bagaimana pemilihan kepala sekolah, pengangkatan guru. Faktor internal

ini akan mempengaruhi pandangan dan pengalaman sekolah. Selain itu, pandangan dan pengalaman sekolah juga akan dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Teori kedua yang dapat diadopsi adalah Teori *Organizing Business for Excelency* yang dikembangkan oleh Andrew Tani (2004). Teori ini menekankan pada keberadaan system organisasi yang mampu merumuskan dengan jelas visi, misi dan strategi untuk mencapai tujuan yang optimal. Teori ini menjelaskan bahwa peningkatan mutu sekolah berawal dari dan dimulai dari dirumuskannya visi sekolah. Dalam rumusan visi ini terkandung mutu sekolah yang diharapkan di masa mendatang. Visi sebagai gambaran masa depan dapat dijabarkan dalam wujud yang lebih konkret dalam bentuk misi, yaitu suatu pernyataan tentang apa yang akan dilakukan untuk bisa mewujudkan gambaran masa depan menjadi realitas. Konsep misi mengandung dua aspek, yaitu aspek abstrak dan konkret. Misi mengandung aspek abstrak dalam bentuk perlunya kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sesuatu yang tidak tampak. Kepemimpinan yang hidup di sekolah akan melahirkan kultur sekolah. Bagaimana bentuk dan sifat kultur sekolah sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan di sekolah. Jadi kepemimpinan dan kultur sekolah merupakan sisi abstrak dari konsep misi (Zamroni, 2007).

Peningkatan Mutu Pendidikan dapat juga dilakukan melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS dipandang sebagai alternatif dari pola umum pengoperasian sekolah yang selama ini memusatkan wewenang di kantor pusat dan daerah. MBS adalah strategi untuk meningkatkan pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan dari pusat dan daerah ke tingkat sekolah. Dengan demikian, MBS pada dasarnya merupakan sistem manajemen di mana sekolah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. MBS memberikan kesempatan pengendalian lebih besar kepada kepala sekolah, guru, murid dan orang tua atas proses pendidikan di sekolah mereka (Depdiknas, 2003).

Dalam pendekatan ini, tanggung jawab pengambilan keputusan tertentu mengenai anggaran, kepegawaian dan kurikulum ditempatkan di tingkat sekolah dan bukan di tingkat daerah apalagi pusat. Melalui keterlibatan guru, orang tua dan anggota masyarakat lainnya dalam keputusan-keputusan penting, MBS dipandang dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif bagi para murid. Dengan demikian, pada dasarnya MBS adalah upaya memandirikan sekolah dengan memberdayakannya. Para pendukung MBS berpendapat bahwa prestasi

belajar murid lebih mungkin meningkat jika manajemen pendidikan dipusatkan di sekolah ketimbang di tingkat daerah. Para kepala sekolah cenderung lebih peka dan sangat mengetahui kebutuhan murid dan sekolahnya ketimbang para birokrat di tingkat pusat dan daerah. Lebih lanjut dinyatakan bahwa reformasi pendidikan yang bagus sekalipun tidak akan berhasil jika para guru yang harus menerapkannya tidak berperan serta dalam merencanakannya.

Berdasarkan MBS maka tugas-tugas manajemen sekolah ditetapkan menurut karakteristik dan kebutuhan sekolah itu sendiri. Oleh karena itu, sekolah mempunyai otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar atas penggunaan sumber daya sekolah guna memecahkan masalah sekolah dan menyelenggarakan aktivitas pendidikan yang efektif demi perkembangan jangka panjang sekolah. Model MBS yang diterapkan di Indonesia adalah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Konsep dasar MPMBS adalah adanya otonomi dan pengambilan keputusan partisipatif, artinya MPMBS memberikan otonomi yang lebih luas kepada masing-masing sekolah secara individual dalam menjalankan program sekolahnya dan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Sebagai suatu sistem, MPMBS memiliki komponen-

komponen yang saling terkait secara sistematis satu sama lain, yaitu *context, input, process, output, dan outcome* (Depdiknas, 2003: 52). Muara dari semua kegiatan sekolah adalah mutu hasil belajar siswa. Kemajuan suatu sekolah akan dilihat dari sejauh mana kualitas hasil belajar siswanya. Oleh karena itu, indikator keberhasilan pelaksanaan MPMBS di sekolah adalah kualitas kinerja siswa atau kualitas hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa dapat bersifat akademik maupun non-akademik. Dalam hal ini, sekolah harus dapat menunjukkan sejauh mana kinerja siswa ini meningkat (secara kuantitatif dan kualitatif) setelah program MPMBS dilakukan. Dalam mengukur keberhasilan kinerja siswa ini, sekolah hendaknya memiliki indikator-indikator yang jelas, diketahui oleh semua pihak, dan dapat diukur dengan mudah. Selain terdapat keluaran (*output*), sekolah juga harus memiliki kriteria keberhasilan yang jelas terhadap dampak (*outcome*) program-program sekolah terhadap sekolah sendiri, lulusannya, dan masyarakat

PENUTUP

Pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan, kepribadian, budi pekerti, semangat, dan sebagainya. Aktivitas pendidikan pada kehidupan manusia mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan tingkat

hidup manusia. Pendidikan merupakan tiang pancang kebudayaan dan pondasi utama untuk membangun peradaban bangsa. Kesadaran akan arti penting pendidikan akan menentukan kualitas kesejahteraan lahir batin dan masa depan bangsa. Bangsa yang

berhasil mencapai tingkat kemajuan kebudayaan dan teknologi tinggi harus disangga oleh kualitas pendidikan yang sangat kokoh. Dengan kualitas pendidikan yang tinggi maka akan meningkatkan pula kualitas sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. 2014. *Pengantar Pendidikan: Asas & Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Mudyahardjo. 2012. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindon Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Walker, Melanie & Elaine Unterhalter (eds). 2007. *Amartya Sen's Capability Approach and Social Justice in Education*. New York: Palgrave MacMillan.
- Darmawan, Indra. 2011. "Makna Pendidikan Dasar Untuk Semua". *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Akuntansi*. Volume V Nomor 1 Halaman 59-65 Desember.
- Darmawan, Indra. 2015. "Pendidikan dan Kewirausahaan". *Harian Kedaulatan Rakyat*. 2 Juli. Halaman 10.
- Garis-Garis Besar Haluan Negara*. 1993. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Suryadi, Ace. 1999. *Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Haryati, Sri. 2012. "Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah dan Madrasah melalui Proses Akreditasi". *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*. Volume 12 No. 3 Desember halaman 199-204.
- Zamroni. 2007. *Meningkatkan Mutu Sekolah, Teori, Strategi dan Prosedur*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
- Depdiknas. 2003. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*; Buku 1. Konsep Dasar. Jakarta: Depdiknas.